

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KELAPARAN DI INDONESIA: REALITA DAN PEMBELAJARAN

POLICY TACKLING THE POORNESS AND HUNGER IN INDONESIA : REALITY AND STUDY

AsiahHamzah
BagianAdministrasi Dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas

ABSTRACT

This article present the study about policy tackling the poorness and hunger in Indonesia by various reality and study. Basically poorness can be defined simply and also in wide meaning. Reality of poorness and hunger in Indonesia, indicating that though year 2015 closer, still need some evaluation because of its attainment still vary from which have been reached, will be reached, not yet been reached, and need the special attention. Various policy in overcoming poorness and hunger in Indonesia have to be executed by various sector with the support of various party. Obloquy to poorness during the time is the lack of the understanding of impecunious resident characteristic, do not relate at real problems faced by the impecunious society, being based on individual and do not have continuation. Some area need the serious handling in poorness and starvation. Learn from other, dissimilar state represent one of option in overcoming starvation and poorness

Keywords: policy, poorness, starvation

Pendahuluan

MDGs (Millenium Development Goals) telah menelorkan delapan butir kesepakatan yang meliputi : 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan; 2. Mencapai pendidikan dasar yang universal (pendidikan untuk semua) ; 3. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4.Mengurangi jumlah kematian anak; 5.Meningkatkan kesehatan ibu; 6.Memerangi HIV/AIDS dan penyakit lainnya; 7.Menjamin kelestarian lingkungan; dan 8.Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Penanggulangan kemiskinan perlu menjadi agenda kebijakan penting karena secara moral pemerintah harus mengemban tanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang secara eksplisit memberi amanat kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara. Oleh karena itu jika pemerintah melalaikan masalah kemiskinan berarti pula pelanggaran terhadap konstitusi.² Di samping itu, saat ini penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan menjadi suatu keharusan bagi pemerintah, karena hal ini sudah menjadi komitmen global sejak dilaksanakan konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun

2000 yang telah menelorkan Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) untuk mencapai kesejahteraan penduduk tahun 2015. Di samping itu, banyak faktor penyebab terjadinya kelaparan seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia.³ Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan, menurunnya pendapatan ril dan tingginya tingkat pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan.

Penulis berargumen bahwa pemahaman tentang pencapaian MDGs di Indonesia harus dapat dipahami secara komprehensif. Pertanyaan yang mengemuka seperti : Apa konsep dasar kemiskinan dan kelaparan ?; Bagaimana realita kemiskinan dan kelaparan di Indonesia ?; Apa saja kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia ?; Apa kritik terhadap penanggulangan kemiskinan ?; Bagaimana implementasi penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di beberapa daerah ?; Apa yang perlu dipelajari dari negara lain ?.

Semuanya pertanyaan tersebut tentunya membutuhkan jawaban akurat.

Tulisan ini disusun dengan tujuan menyajikan realita dan pembelajaran tentang penanggulangan kemiskinan dan kelaparan khususnya di Indonesia. Di samping konsep dasar kemiskinan dan kelaparan, penulis memfokuskan pembahasannya tentang realita kemiskinan dan kelaparan di Indonesia, kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan di Indonesia, kritik terhadap penanggulangan kemiskinan, implementasi penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di beberapa daerah, serta pembelajaran dari negara lain. Tulisan ini merupakan sintesis dari berbagai kajian dan laporan yang sebagian besar diperoleh dari Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010.

Konsep Dasar Kemiskinan Dan Kelaparan

Berbicara tentang kemiskinan, pada dasarnya dapat didefinisikan secara sederhana maupun dalam arti luas. Dalam pengertian yang sederhana kemiskinan dapat diterangkan sebagai kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu dalam arti yang lebih luas kemiskinan dapat meliputi ketidakcukupan yang lain seperti : rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja dan berusaha, keterbatasan akses terhadap berbagai hal, dan lain-lain. Dimensi kemiskinan, secara dinamis mengalami perubahan dengan mempertimbangkan aspek nonekonomi masyarakat miskin. Sedikitnya terdapat sembilan dimensi kemiskinan yang perlu dipertimbangkan, yaitu : (a) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (papan, sandang, dan perumahan); (b) aksesibilitas ekonomi yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi); (c) lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital; (d) rentan terhadap guncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun massal; (e)

rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya alam; (f) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; (h) terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan; (i) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; dan (j) mengalami ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial.

Karakteristik penduduk miskin secara lebih spesifik, di antaranya dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut : (a) masyarakat miskin sebagian besar tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian dominan berusaha sendiri di sektor pertanian (60,0 %); (b) sebagian besar (60 %) penduduk berpenghasilan rendah mengkonsumsi energi kurang dari 2.100 kkal/hari; (c) berdasarkan indikator silang proporsi pengeluaran pangan (> 60 %) dan kecukupan gizi (energi < 80%), diperoleh proporsi rumah tangga rawan pangan nasional mencapai sekitar 30,0 %; dan (d) penduduk miskin dengan tingkat SDM yang rendah, umumnya tinggal di wilayah dengan karakteristik marginal, dukungan infrastruktur terbatas, dan tingkat adopsi teknologi rendah.

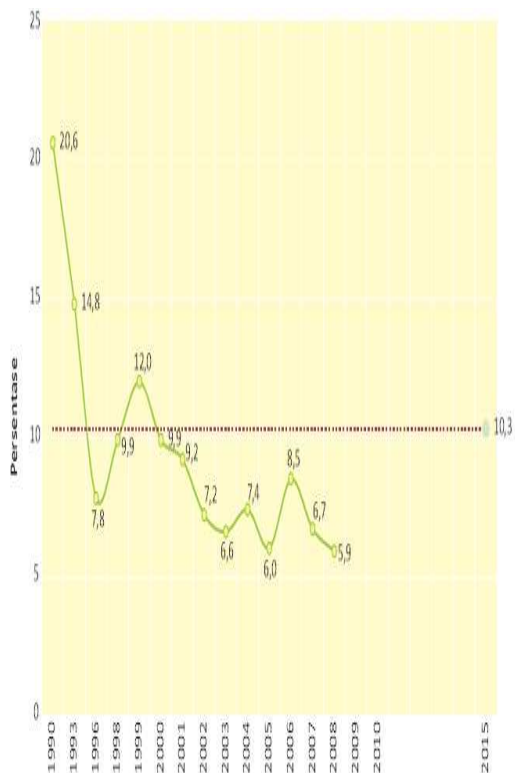
Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.

Realita Kemiskinan Dan Kelaparan Di Indonesia

Grafik 1. Kemajuan dalam Mengurangi Kemiskinan Ekstrim (US\$ 1,0/kapita/hari) Dibandingkan dengan Target MDG

Untuk Target 1A (Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015), dimana proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari, pada tahun 1990 sebesar 20,60 % dan pada tahun 2008 sebesar 5,90 %,

sedangkan target MDG 2015 sebesar 10,30 %, dengan demikian maka statusnya sudah tercapai.



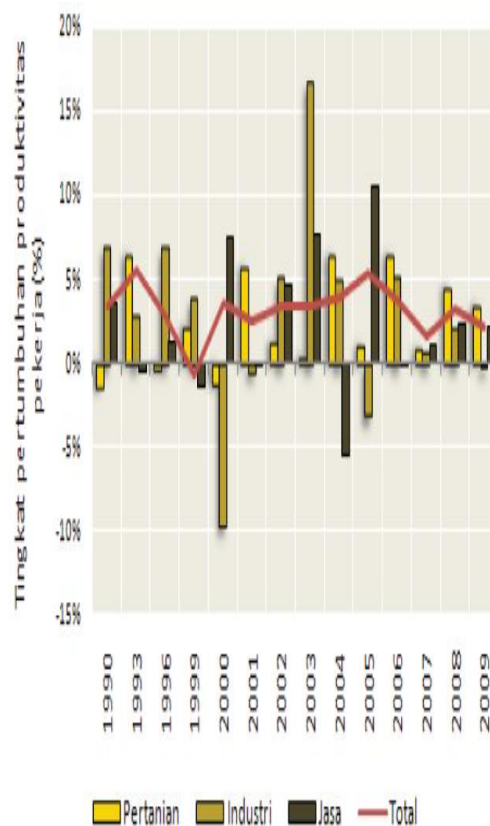
Sumber : BAPPENAS, 2010

Serta indeks kedalaman kemiskinan, pada tahun 1990 sebesar 2,70 % dan pada tahun 2010 sebesar 2,21 %, sedangkan target MDG 2015 harus berkurang, dengan demikian maka statusnya akan tercapai.

Grafik 2. Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja (persen) Tahun 1990-2009

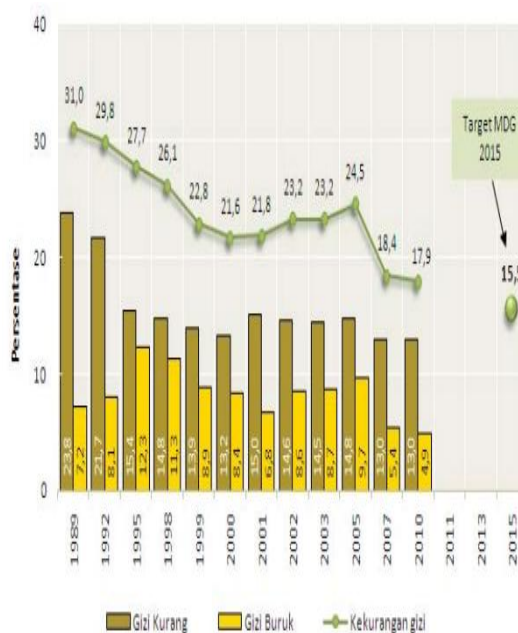
Untuk Target 1B (Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda), dimana laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, pada tahun 1990 sebesar 3,52 % dan pada tahun 2009 sebesar 2,24 %. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, pada tahun 1990 sebesar 65 % dan pada tahun 2009 sebesar 62 %. Serta Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, pada tahun 1990 sebesar 71 % dan pada tahun 2009

sebesar 64 %, sedangkan target MDG 2015 harus berkurang, dengan demikian maka statusnya akan tercapai.



Sumber : BAPPENAS, 2010

Grafik 3. Perkembangan Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita (1989-2007)



Sumber : BAPPENAS, 2010

Untuk target 1C (Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015), dimana prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi, pada tahun 1989 sebesar 31,0 % dan pada tahun 2010 sebesar 17,9 %, sedangkan target MDG 2015 sebesar 15,5 %, dengan demikian maka statusnya akan tercapai. Untuk prevalensi balita gizi buruk, pada tahun 1989 sebesar 7,2 % dan pada tahun 2010 sebesar 4,9 %, sedangkan target MDG 2015 sebesar 3,6 %, dengan demikian maka statusnya akan tercapai. Sedangkan untuk prevalensi balita gizi kurang, pada tahun 1989 sebesar 23,8 % dan pada tahun 2010 sebesar 13,0 %, sedangkan target MDG 2015 sebesar 11,9 %, dengan demikian maka statusnya akan tercapai. Di sisi lain, proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum : untuk 1400 Kkal/kapita/hari, pada tahun 1990 sebesar 17,00 % dan pada tahun 2009 sebesar 14,47 %, sedangkan target MDG 2015 sebesar 8,50 %, dengan demikian maka statusnya perlu perhatian khusus. Sedangkan untuk 2000 Kkal/kapita/hari, pada tahun 1990 sebesar 64,21 % dan pada tahun 2009 sebesar 61,86 %, sedangkan target MDG 2015 sebesar 35,32 %, dengan demikian maka statusnya perlu perhatian khusus.

Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Kelaparan Di Indonesia

Untuk Target 1A (Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015), kebijakannya adalah :

1. Pemerintah berkomitmen untuk membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi semua pihak yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan nasional.
2. Meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga.

3. Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri.
4. Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif.
5. Meningkatkan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.
6. Peningkatan upaya di daerah juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan rencana mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 dengan membantu Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (RAD MDG).
7. Untuk melaksanakan itu semua, seluruh kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan melalui Tim Nasional yang diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan kementerian teknis terkait.

Untuk Target 1B (Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda), kebijakannya adalah :

1. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya melalui investasi dan perluasan usaha.
2. Memperbaiki kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja dan berusaha.
3. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah.
4. Meningkatkan kualitas pekerja.
5. Meningkatkan produktivitas pekerja pertanian.
6. Mengembangkan jaminan sosial dan memberdayakan pekerja.
7. Menerapkan peraturan ketenagakerjaan utama.

Untuk target 1C (Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015), kebijakannya adalah :

1. Meningkatkan akses penduduk miskin, terutama anak balita dan ibu hamil untuk memperoleh makanan yang aman dan bergizi cukup serta mendapatkan intervensi pelayanan lainnya.
2. Memperkuat pemberdayaan masyarakat dan merevitalisasi posyandu.
3. Meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat daerah terutama untuk mengurangi diparitas ketahanan pangan antar daerah.
4. Memperkuat lembaga di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai kewenangan kuat dalam merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi.

Kritik Terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Kritik umum terhadap penanggulangan kemiskinan selama ini adalah kurangnya pemahaman karakteristik penduduk miskin, tidak mengacu pada permasalahan riil yang dihadapi masyarakat miskin, berbasis individu dan tidak berkelanjutan.

Koreksi pendekatan penanggulangan kemiskinan hendaknya mengacu kepada beberapa indikator penting berikut ini : (a) indikator keberhasilan individu perlu dikomplemen dengan kemajuan/prestasi kelompok dan masyarakat; (b) indikator kemiskinan konvensional, perlu dikoreksi dengan kondisi lokal yang bersifat lokasi spesifik; (c) paradigma penanggulangan kemiskinan dengan pengakuan terhadap potensi partisipatif dan pemberdayaan kaum miskin sebagai aktor utama dalam perang melawan kemiskinan; (d) kinerja penanggulangan kemiskinan bukan ditentukan oleh ketepatan kriteria/indikator, tetapi oleh kepedulian dan komitmen pelaku program; (e) ketidakberlanjutan program yang dinilai baik dan berhasil menyebabkan program penanggulangan kemiskinan tidak efektif dan kurang efisien; (f) program penanggulangan kemiskinan akan ditentukan oleh basis partisipatif masyarakat desa, dengan memperhatikan modal sosial kaum miskin untuk mengembangkan diri.

Secara lebih spesifik, langkah strategis pemberdayaan penduduk miskin dan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat sebagai acuan ke depan. Langkah pemberdayaan penduduk miskin hendaknya didasarkan pada reorientasi fokus dan pendekatan berikut : (a) fokus pemberdayaan keluarga miskin pada kebutuhan pangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan; (b) fokus kebijakan pada transformasi struktural sektor pertanian ke sektor non pertanian; (c) menumbuhkan keswadayaan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan komunitas penduduk miskin; (d) melakukan reposisi peran pihak-pihak luar desa dari agen pembangunan menjadi fasilitator pemberdayaan.

Landasan praktis operasional di lapangan dalam penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas dapat mengacu pada beberapa landasan pokok sebagai berikut : (a) kewenangan menentukan sendiri aktivitas penanggulangan kemiskinan (aktivitas relevan, sesuai kebutuhan dan kontekstual, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal), dan meniadakan ego sektoral yang bersifat tumpang-tindih, tidak efektif, dan kurang efisien; (b) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pihak luar (teknis, informasi, teknologi, dan lain-lain); (c) menumbuhkan sendiri prinsip transparansi dan akuntabilitas (kontrol publik) di tingkat masyarakat desa dalam aktivitas penanggulangan kemiskinan.

Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Kelaparan Di Beberapa Daerah

Ada pandangan di kalangan ilmuwan sosial bahwa kemiskinan sebenarnya tidak lahir dengan sendirinya dan juga bukan muncul tanpa sebab, tetapi kondisi ini banyak dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik. Dapat ditelaah keberadaan orang miskin sebagai rakyat yang tertindas dalam dua perspektif. Pertama; pada tataran faktual, kemiskinan pada masyarakat yang sedang berkembang ternyata tidak hanya

menyebabkan penderitaan yang tak berkesudahan, melainkan juga kematian manusia sebelum waktunya. Penindasan sistematis dan konflik bersenjata telah memperburuk situasi mereka yang tertindas. Kedua; pada tataran historis-etis, penderitaan kaum miskin dan tertindas itu disebabkan oleh struktur-struktur yang tidak adil baik di tingkat lokal maupun global yang lebih jauh telah menghasilkan kekerasan yang melembaga (*institutionalized violence*) dan korbannya pertama-tama adalah mereka yang miskin.

Pandangan di atas memperkuat asumsi bahwa pada masyarakat yang budaya patriarkinya masih sangat kental seperti halnya pada masyarakat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, penanganan masalah kemiskinan nampaknya memerlukan pendekatan tersendiri yang mungkin berbeda dengan penanganan kemiskinan di daerah yang matrilineal. Pada masyarakat dengan kondisi budaya yang sangat paternalistik, mereka yang berada pada posisi yang tertindas dan lemah akan lebih banyak yang miskin. Mereka ini adalah kaum perempuan, dimana pada masyarakat patrilineal perempuan menduduki posisi subordinat laki-laki, termarginal, dan terdiskriminasi. Whitehead telah mendata bahwa lebih dari separuh penduduk miskin di negara berkembang adalah kaum perempuan.¹⁵ Data dari perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa dari 1,3 miliar warga dunia yang masuk katagori miskin, 70 % nya adalah kaum perempuan Hal ini menguatkan terjadinya feminisasi kemiskinan yakni sebuah kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan dialami oleh kaum perempuan.

Kondisi yang tidak jauh berbeda kemungkinan juga terjadi di masyarakat Bali. Dari 821.313 kepala keluarga (KK) penduduk Bali (sampai Mei 2006), sebanyak 147.044 KK (17,9 %) diantaranya masih tergolong KK miskin, jumlah ini tersebar di 9 kabupaten/kota.¹⁶ Dari jumlah RTM ini, sebagian besar kondisi miskin akan lebih dirasakan oleh kaum perempuan terutama

perempuan ibu rumah tangga karena kalau dilihat dari komposisi penduduk Bali tahun 2006, sebagian besar penduduk umur 19 tahun ke atas adalah kaum perempuan. Mereka ini sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan juga lansia. Di samping itu dalam kehidupan rumah tangga, perempuan/ibu rumah tangga secara budaya diberikan peran dan tanggung jawab pada urusan domestik. Ini artinya bahwa mereka menanggung beban untuk mengurus kepentingan konsumsi keluarga sehari-hari. Dalam kondisi ekonomi keluarga yang serba kurang, maka perempuanlah yang paling merasakannya.

Sampai saat ini jumlah penduduk miskin yang ada di Bali masih cukup tinggi dan kondisi kemiskinan ini lebih banyak dialami dan dirasakan oleh kaum perempuan. Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan tidak hanya kemiskinan ekonomis, tetapi juga kemiskinan multidimensional seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, politik, ekonomi, informasi, kesehatan dan lain-lain. Feminisasi kemiskinan yang demikian erat kaitannya dengan masih kuatnya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. karena kultur ini meletakkan kaum perempuan pada posisi subordinat, termarginal, dan terdiskriminasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menempatkan "Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan" sebagai prioritas pembangunan nasional yang patut dijawantahkan secara operasional di daerah-daerah termasuk Provinsi NTT sebagai bagian integral NKRI yang tingkat kemiskinannya masih sekitar 59 %. Sehubungan dengan itu, rangkaian kegiatan yang telah berlangsung tidak sekedar melihat kondisi senyatanya potret diri kesejahteraan dan kemiskinan NTT, akan tetapi lebih dari itu, "harus" terbangun kesepakatan dan tekad bersama untuk menempatkan "penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan" sebagai prioritas kebijakan daerah.

Di NTT, kebijakan dan program pemerintah kurang efektif dalam memecahkan masalah kemiskinan dan mencegah proses pemiskinan dan pewarisan kemiskinan. Kelemahan tersebut antara lain : (a) sistem dan kebijakan yang tidak berpihak kepada si miskin; (b) kebijakan bersifat sektoral, terpusat, dan seolah-olah kemiskinan hanya menjadi urusan pemerintah semata; (c) kurangnya kolaborasi multi pihak; (d) program penanggulangan kemiskinan bersifat parsial, tidak mencakup semua aspek dan dimensi; (e) memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak berdaya dengan lebih banyak memberikan bantuan ketimbang memberdayakan sehingga menciptakan ketergantungan, melemahkan daya inovatif, kreativitas, dan daya juang serta daya saing masyarakat; (f) masalah kemiskinan dipandang sama di semua wilayah; serta (g) ketergantungan pada pembiayaan dari donor.

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di provinsi NTT tahun 2010 yaitu sebanyak 23 %, masih jauh dari target rata-rata nasional tahun 2010 yakni 13,3 % dan target tahun 2015 yakni 7,5 %. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja di provinsi NTT tahun 2010 yaitu sebesar 0,73 menurun dari tahun 1990 yakni sebesar 0,77. Prevalensi anak balita kekurangan gizi di provinsi NTT tahun 2007 yaitu sebanyak 33,6 %, masih jauh dari target rata-rata nasional yakni 18,4 % dan target tahun 2015 yakni 15,5 %.

Belajar Dari Negara Lain

Seperti negara berkembang pada umumnya, Cina juga mengalami sejarah panjang, hampir satu dasawarsa (1986-1996), dalam mencari bentuk yang tepat dalam perumusan dan implementasi program pengentasan kemiskinan. Dalam periode tersebut, pemerintah Cina mengimplementasi program parsial-sektoral, mulai dari tingkat pusat-provinsi dan daerah pada tingkatan yang lebih rendah. Pendekatan ini dinilai gagal dan tidak memberikan hasil yang optimal.¹⁸

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, sejak 1996, pemerintah Cina membangun kelembagaan khusus pengentasan kemiskinan di pusat dan daerah, yang disebut dengan Leading Group Office for Poverty Reduction (LGPR). Lembaga ini membangun jaringan kelembagaan di lapangan sebagai badan pelaksana yang disebut PADO (Poor Area Development Office). Pada setiap tingkatan secara spasial, sasaran LGPR adalah : (a) melakukan koordinasi dan kohesi program lintas sektoral, (b) percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah miskin, dan (c) melakukan koordinasi pendanaan program pengentasan kemiskinan.

Pendekatan baru pengentasan kemiskinan di Cina ini mencakup beberapa elemen pokok, seperti : (a) pendekatan berbasis proyek multisektoral, (b) program investasi terpadu pertanian dan non pertanian, (c) fasilitasi akses pendidikan dasar dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar membangun kapasitas dan potensi sumber daya manusia, dan (d) fasilitasi kredit mikro dan kelembagaan keuangan pedesaan.

Kesimpulan

Berbagai kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan di Indonesia harus dilaksanakan secara multisektor dengan dukungan berbagai pihak. Beberapa daerah perlu penanganan yang serius dalam penanggulangan kemiskinan dan kelaparan. Belajar dari negara lain merupakan salah satu opsi dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

Hendaknya pemerintah Indonesia harus lebih serius menggalakkan program memberantas kemiskinan dan kelaparan dengan melaksanakan berbagai program berbasis pemberdayaan masyarakat serta fokus terhadap pelaksanaan strategi kemandirian pangan, berupa kemandirian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa, untuk mengembangkan dan memelihara cadangan pangannya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Adiyoga, IDBM, dan E. Hermiati. 2003. Pola Nafkah Lokal : Acuan Mengkaji Kemiskinan di Era Otonomi Daerah (Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur). Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Tahun I No. 12 Februari 2003. Jakarta. www.ekonomirakyat.org.
- BPS. 2006. Pendataan Rumah Tangga Miskin di Provinsi Bali.
- BPS. 2008. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Jakarta.
- BPS. 2010. Data Strategis BPS. Jakarta.
- BPS. 2010. Pendataan Rumah Tangga Miskin di Provinsi NTT.
- Cahyono. 2005. Wajah Kemiskinan Wajah Perempuan. Jurnal Perempuan No. 42. Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Cook et all. 2004. Food Insecurity Is Associated with Adverse Health Outcomes among Human Infants and Toddlers. J. Nutr. 134:1432-1438.
- FAO (Food and Agriculture Organisation). 2003. Proceedings, Measurement and Assessment of Food Deprivation and Undernutrition. Internasional Scientific Symposium. Rome, 26-28 Juni 2002.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2010. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010. Jakarta.
- Lenhart, NM dan Read, MH. 1989. Demographic Profile and Nutrient Intake Addressment of
- World Bank. 2007. Spending for Development: Making the Most of Indonesia's New Opportunities. World Bank, Jakarta.
- Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Thn. I No. 7, November 2002. Jakarta. www.ekonomirakyat.org.
- Individual using Emergency Food Program. Journal of The American Dietetic Association, 89 (9) 1989.
- Mubyarto. 2002. Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah dalam Era Otonomi Daerah.
- Muliawan, Partha. 2007. Perempuan dan HIV/AIDS. Makalah Seminar Nasional Peran Gender dalam Meningkatkan Kualitas Hidup. Denpasar.
- Muhadjir, 2005. Negara dan Perempuan. Yogyakarta. CV Adipura.
- Pasaribu, B. 2006. Poverty Profile and the Alleviation Programme in Indonesia. Paper Presented on "Asian Regional Seminar on Poverty Alleviation", Held by AFPPD and IFAD, 5-6 April 2006, Hanoi, Vietnam.
- Rose, D. 1999. Economic Determinants and Dietary Consequences of Food Insecurity Individually in the United States. American Journal of Public Health 87 (12) 1956-1961.
- Sudaryanto, T. dan I.W. Rusastra. 2006. Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan. Seminar Internasional Multifungsi Pertanian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, 27-28 Juni 2006. Lido Lake Resort & Conference, Bogor.
- UNESCAP. 2005. Income Generation and Poverty Reduction: Experiences of Selected Asian Countries. Development Paper No. 26. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), New York, 2005